

## MENYUARAKAN HAM: KEKUATAN MEDIA DALAM ADVOKASI KEADILAN

Yasmin Winda Soraya<sup>1</sup>, Yulia Hidayatul Musyarofah<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pedagogi dan Psikologi,  
Universitas PGRI Wiranegara<sup>1</sup>[yasminwindasoraya@gmail.com](mailto:yasminwindasoraya@gmail.com), <sup>2</sup>[yuliahm801@gmail.com](mailto:yuliahm801@gmail.com)**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji peran media, baik tradisional maupun digital, dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah transformasi digital dan globalisasi. Media berfungsi sebagai alat strategis untuk mengamplifikasi suara kelompok terpinggirkan, membentuk narasi inklusif, dan memobilisasi masyarakat guna mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menganalisis literatur dari jurnal, buku, dan artikel berita untuk memahami dinamika media dalam advokasi HAM, khususnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media daring dan sosial, seperti Twitter dan Instagram, telah memfasilitasi gerakan seperti #KamiBersamaPapua dan #TolakUUNomibusLaw, yang berhasil menyoroti pelanggaran HAM dan menekan pemerintah untuk bertindak. Namun, tantangan seperti penyebaran disinformasi, sensor, intimidasi terhadap jurnalis, dan rendahnya literasi digital menghambat efektivitas advokasi. Penelitian juga mengidentifikasi lima dimensi utama peran media: amplifikasi suara, pembentukan narasi, mobilisasi sosial, tantangan etis-struktural, dan pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Dalam konteks Indonesia, kesenjangan akses digital dan tekanan politik menjadi hambatan signifikan, namun literasi media dan perlindungan kebebasan pers dapat meningkatkan potensi media sebagai agen perubahan. Studi ini menegaskan bahwa media memiliki kekuatan besar untuk memajukan HAM, asalkan didukung oleh kebebasan, integritas jurnalistik, dan strategi komunikasi yang etis. Temuan ini relevan bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat sipil dalam memperkuat peran media untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

**Kata Kunci:** Advokasi, HAM, Keadilan, Media

**Abstract**

*This study examines the role of media, both traditional and digital, in advocating for Human Rights (HAM) amidst digital transformation and globalization. Media serves as a strategic tool to amplify the voices of marginalized groups, shape inclusive narratives, and mobilize communities to push for policy changes that support social justice. Using a qualitative approach through desk study, this study analyzes literature from journals, books, and news articles to understand the dynamics of media in human rights advocacy, especially in Indonesia. The results show that online and social media, such as Twitter and Instagram, have*

**Article History**

Received: June 2025  
Reviewed: June 2025  
Published: June 2025  
Plagiarism Checker No. 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365  
**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*facilitated movements such as #KamiBersamaPapua and #TolakUUOmnibusLaw, which have succeeded in highlighting human rights violations and pressuring the government to act. However, challenges such as the spread of disinformation, censorship, intimidation of journalists, and low digital literacy hinder the effectiveness of advocacy. The study also identifies five main dimensions of the media's role: voice amplification, narrative formation, social mobilization, ethical-structural challenges, and the use of new technologies such as artificial intelligence. In the Indonesian context, the digital access gap and political pressure are significant obstacles, but media literacy and protection of press freedom can increase the potential of the media as an agent of change. This study confirms that the media has great power to advance human rights, provided it is supported by freedom, journalistic integrity, and ethical communication strategies. These findings are relevant for policy makers, activists, and civil society in strengthening the role of the media to create a more just and dignified society.*

**Keywords:** *Advocacy, Human Rights, Justice, Media*

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat. Penghormatan terhadap HAM menjadi tolok ukur peradaban suatu bangsa dan berperan penting dalam menjamin kebebasan individu serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Di tengah arus transformasi digital dan globalisasi yang kian pesat, peran media menjadi semakin signifikan. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai katalisator perubahan sosial yang mampu mengangkat isu-isu HAM ke ruang publik secara luas dan mendalam. Kemampuannya dalam menjangkau audiens lintas batas geografis, sosial, dan politik menjadikan media sebagai alat strategis dalam menyuarkan ketidakadilan, mengungkap pelanggaran HAM, serta membangun kesadaran kolektif. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat. Penghormatan terhadap HAM menjadi tolok ukur peradaban suatu bangsa dan berperan penting dalam menjamin kebebasan individu serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Di tengah arus transformasi digital dan globalisasi yang kian pesat, peran media menjadi semakin signifikan. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai katalisator perubahan sosial yang mampu mengangkat isu-isu HAM ke ruang publik secara luas dan mendalam. Kemampuannya dalam menjangkau audiens lintas batas geografis, sosial, dan politik menjadikan media sebagai alat strategis dalam menyuarkan ketidakadilan, mengungkap pelanggaran HAM, serta membangun kesadaran kolektif.

Dalam konteks ini, media—baik tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi, maupun media digital seperti portal berita daring dan media sosial memiliki kapasitas untuk memengaruhi persepsi publik dan mendorong aksi nyata. Media dapat memberi suara kepada kelompok yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat, perempuan, difabel, yang seringkali tidak mendapat representasi layak dalam diskursus arus utama. Dengan memberikan ruang bagi narasi-narasi alternatif dan testimoni dari korban pelanggaran HAM, media memperkuat prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Selain itu, peran media dalam membentuk opini publik juga berdampak pada proses pengambilan kebijakan, terutama dalam menekan pemerintah dan institusi terkait agar bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.

Di Indonesia, dinamika media dalam memperjuangkan HAM berlangsung dalam konteks yang kompleks. Di satu sisi, munculnya media daring dan maraknya penggunaan media sosial telah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam advokasi HAM. Berbagai gerakan sosial seperti #ReformasiDikorupsi, #SavePapua, dan kampanye anti-kekerasan seksual menunjukkan bagaimana media digital dapat menjadi alat mobilisasi massa yang efektif. Tapsell (2019) menyoroti bagaimana media digital di Indonesia berperan penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat muda serta memperkuat jaringan solidaritas antar komunitas. Namun, di sisi lain, media juga menghadapi tantangan serius, seperti polarisasi opini, serangan terhadap jurnalis, penyebaran disinformasi, dan tekanan dari kekuatan politik maupun ekonomi yang berupaya membungkam suara kritis.

Laporan Human Rights Watch (2023) menunjukkan bahwa media independen di Indonesia masih kerap menjadi sasaran intimidasi, baik secara hukum maupun fisik, ketika melaporkan isu-isu sensitif seperti pelanggaran HAM oleh aparat negara atau konflik agraria. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan pers dan integritas jurnalistik. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil dan organisasi internasional menjadi penting dalam mendukung kebebasan media serta melindungi jurnalis sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi HAM.

Sementara itu, UNESCO (2022) menekankan pentingnya penguatan literasi media dan informasi (MIL) sebagai salah satu pilar dalam demokratisasi informasi. Literasi media memungkinkan masyarakat untuk memilah informasi yang kredibel, memahami konteks isu HAM secara kritis, dan menghindari manipulasi opini yang dapat merugikan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, media tidak hanya harus akuntabel secara etika dan profesional, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendidik masyarakat agar menjadi pengguna informasi yang cerdas dan berempati.

Silverstone (2020) menegaskan bahwa media memikul tanggung jawab moral untuk menciptakan ruang publik yang adil, dialogis, dan inklusif. Media harus mampu menjadi jembatan antar kelompok sosial yang berbeda, membangun empati, serta memfasilitasi diskusi yang konstruktif guna memperkuat kohesi sosial dan solidaritas dalam perjuangan HAM. Peran ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik dan ujaran kebencian di ruang digital.

Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana media baik dalam bentuk tradisional maupun digital dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memperjuangkan HAM. Fokus akan diarahkan pada strategi komunikasi yang berorientasi pada keadilan sosial, tantangan struktural seperti sensor dan represi, serta pentingnya membangun narasi yang berpihak kepada kebenaran dan kemanusiaan. Dalam konteks global maupun lokal, media memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, asalkan kebebasannya dijamin, integritasnya dijaga, dan misinya diarahkan pada pemajuan HAM sebagai nilai universal yang tidak dapat dinegosiasikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel berita yang relevan dengan topik yang dibahas. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat analisis dengan menggali informasi dari literatur yang telah ada. Data dan sumber-sumber dikumpulkan dari literatur yang menjadi pijakan dalam menyusun kerangka berpikir peneliti. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Muda sebagai Calon Pemimpin yang Jujur dan Berintegritas.

## HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang pendahuluan, media, baik dalam bentuk tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi, maupun platform digital seperti media sosial, situs berita daring, dan aplikasi berbasis komunitas, telah terbukti menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Media berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan pelanggaran HAM, meningkatkan kesadaran publik, membentuk narasi yang mendukung keadilan sosial, dan memobilisasi dukungan untuk perubahan kebijakan. Penelitian oleh Papacharissi (2021) menunjukkan bahwa media digital telah merevolusi advokasi HAM melalui kemampuan mereka untuk menciptakan jaringan solidaritas global, seperti terlihat pada gerakan #EndSARS di Nigeria, yang menyoroti kekerasan polisi. Konsep “affective publics” yang dikembangkan oleh Papacharissi (2021) menjelaskan bagaimana media sosial memungkinkan individu untuk terhubung secara emosional dan mengorganisir kampanye HAM dengan cepat, tanpa memerlukan struktur organisasi formal.

Di Indonesia, media daring telah menjadi tulang punggung advokasi HAM, terutama dalam isu-isu seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Menurut Suistyarini & Dewantara. (2023), platform seperti Katadata.co.id dan media sosial seperti Twitter dan Instagram telah memungkinkan jurnalis dan aktivis untuk menyoroti kasus-kasus seperti penggusuran paksa komunitas adat, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas seperti Syiah, dan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Kampanye daring, seperti #KamiBersamaPapua atau #TolakUUOmnibusLaw, menunjukkan bagaimana media dapat memobilisasi dukungan publik dan menekan pemerintah untuk bertindak. Contohnya, kampanye #SaveSitiAisyah pada 2017-2019 berhasil menarik perhatian internasional terhadap pekerja migran Indonesia yang dihukum mati di Malaysia, berkat liputan media dan petisi daring.

Namun, hasil analisis juga mengungkap sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi media dalam advokasi HAM. hillughi et al. (2018) menyoroti bahwa penyebaran informasi palsu di media digital sering kali lebih cepat daripada informasi yang benar, yang dapat melemahkan upaya advokasi HAM dengan menciptakan narasi yang keliru atau memicu polarisasi sosial. Di Indonesia, hoaks tentang isu agama atau etnis sering kali memperburuk konflik sosial, mengalihkan perhatian dari isu HAM yang sebenarnya. Laporan Freedom House (2024) mencatat bahwa jurnalis dan media independen di banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi ancaman seperti sensor, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan fisik. Contohnya, kasus penahanan jurnalis di Papua yang melaporkan pelanggaran HAM menunjukkan betapa rentannya kebebasan pers di wilayah-wilayah tertentu.

Penelitian oleh Global Partnership for Education (2023) menekankan bahwa rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama dalam memahami informasi HAM secara kritis. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat rentan terhadap manipulasi informasi, yang dapat mengurangi efektivitas kampanye advokasi. Namun, di sisi lain, media memiliki potensi besar untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, sebagaimana dijelaskan oleh Dahlgren (2022), yang memungkinkan dialog antar kelompok masyarakat, termasuk mereka yang termarginalkan. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa media daring telah berhasil memobilisasi dukungan untuk isu-isu seperti keadilan lingkungan (misalnya, perlindungan hutan adat) dan hak-hak pekerja migran, tetapi keberhasilan ini sering kali terhambat oleh tekanan politik, ancaman hukum, dan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi yang akurat. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam advokasi HAM, baik melalui amplifikasi suara, pembentukan narasi, maupun mobilisasi sosial. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan seperti informasi palsu, sensor, dan rendahnya literasi digital, serta perlunya perlindungan terhadap kebebasan pers.

Peran media dalam advokasi HAM dapat dianalisis melalui lima dimensi utama: amplifikasi suara, pembentukan narasi, mobilisasi sosial, tantangan etis dan struktural, dan peran teknologi baru dalam advokasi. Pembahasan berikut akan menguraikan masing-masing dimensi secara mendalam, dengan merujuk pada konteks global dan lokal (khususnya Indonesia), serta mengintegrasikan temuan dari referensi baru yang relevan dan studi kasus spesifik.

### 1. Amplifikasi Suara: Memberi Ruang bagi yang Termarginalkan

Media memiliki kemampuan unik untuk mengamplifikasi suara kelompok-kelompok yang sering kali tidak terdengar dalam wacana publik, seperti komunitas adat, kelompok minoritas agama atau etnis, korban kekerasan berbasis gender, dan pekerja migran. Gerakan #EndSARS di Nigeria pada 2020, misalnya, menunjukkan bagaimana media sosial memberikan platform bagi warga sipil untuk menyerukan penghentian kekerasan polisi, yang kemudian memicu protes nasional dan perhatian internasional (Papacharissi, 2021). Di Indonesia, media daring telah memainkan peran serupa. Misalnya, pelaporan oleh situs berita Mongabay.co.id tentang pengusuran paksa komunitas adat di Kalimantan telah menarik perhatian publik dan mendorong diskusi tentang hak atas tanah (Apriando, T: 2018). Demikian pula, kampanye media sosial seperti #KamiBersamaPapua telah membantu menyoroti pelanggaran HAM di Papua, seperti kekerasan militer terhadap warga sipil.

Namun, amplifikasi suara ini sering kali menghadapi hambatan. Media independen sering beroperasi di bawah tekanan politik dan ekonomi. Freedom House (2024) melaporkan bahwa jurnalis di Indonesia yang berusaha mengamplifikasi suara kelompok marginal, seperti aktivis lingkungan, sering menjadi sasaran kriminalisasi atau ancaman. Contohnya, kasus penahanan jurnalis Dandhy Laksono pada 2019 karena dokumentasinya tentang konflik di Papua menunjukkan risiko yang dihadapi media independen. Selain itu, ketimpangan akses terhadap media digital, terutama di daerah pedesaan atau terpencil di Indonesia, membatasi kemampuan kelompok marginal untuk memanfaatkan platform ini secara langsung. Penelitian oleh Freedom House (2024) menunjukkan bahwa kesenjangan digital di Indonesia masih menjadi hambatan besar, dengan hanya sekitar 60% populasi memiliki akses internet yang memadai pada 2023. Oleh karena itu, meskipun media memiliki potensi besar untuk memberikan suara kepada yang tertindas, keberhasilannya bergantung pada kebebasan pers, akses teknologi, dan perlindungan terhadap jurnalis.

### 2. Pembentukan Narasi: Membangun Ruang Publik yang Inklusif

Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk narasi yang memengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu HAM. Kang, dkk. (2024) memperkenalkan konsep “civic cultures,” yang menekankan peran media dalam menciptakan ruang publik yang mendukung dialog demokratis dan inklusif. Dalam konteks HAM, narasi yang dibentuk oleh media dapat memperkuat solidaritas sosial atau, sebaliknya, memperburuk polarisasi. Misalnya, pelaporan yang sensitif tentang isu kesetaraan gender atau keberagaman agama dapat membantu membangun pemahaman bersama di kalangan masyarakat. Sebaliknya, narasi yang sensasional atau bias dapat memperburuk konflik, seperti yang terlihat dalam penyebaran hoaks tentang isu agama di Indonesia, yang sering kali memicu kekerasan antar kelompok (Vosoughi et al., 2018).

Di Indonesia, media daring seperti Detik.com dan CNN Indonesia telah berupaya membentuk narasi yang mendukung HAM melalui liputan investigatif tentang pelanggaran HAM, seperti kasus pelanggaran hak pekerja migran atau kekerasan terhadap perempuan. Namun, tantangan utama adalah penyebaran informasi palsu, yang sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau ekonomi. Vosoughi et al. (2018) mencatat bahwa informasi palsu menyebar lebih cepat di media sosial karena sifatnya yang emosional dan sensasional, seperti yang terlihat dalam hoaks tentang “penistaan agama” dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2016-2017. Untuk mengatasi tantangan ini, Global Partnership for Education (2023) menekankan pentingnya literasi digital, yang memungkinkan masyarakat untuk membedakan

informasi yang akurat dari hoaks dan memahami isu HAM secara kritis. Dengan demikian, media memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk narasi yang tidak hanya informatif tetapi juga etis dan inklusif.

### 3. Mobilisasi Sosial: Mendorong Perubahan Kebijakan

Media memiliki peran krusial dalam memobilisasi masyarakat untuk mendukung perubahan kebijakan yang mendukung HAM. Gerakan #FridaysForFuture, yang dipimpin oleh aktivis seperti Greta Thunberg, menunjukkan bagaimana media sosial dapat memobilisasi jutaan orang untuk menuntut aksi iklim, yang terkait erat dengan hak atas lingkungan yang sehat Sulianta, F (2024). Di Indonesia, kampanye media daring telah mendorong perhatian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kekerasan terhadap aktivis lingkungan atau pelanggaran hak-hak buruh migran. Contohnya, kampanye #SaveSitiAisyah pada 2017-2019 berhasil menarik perhatian internasional dan mendorong negosiasi diplomatik berkat liputan media dan petisi daring.

Namun, mobilisasi sosial melalui media tidak selalu menghasilkan perubahan yang diinginkan. Freedom House (2024) mencatat bahwa di Indonesia, tekanan politik dan hukum terhadap media independen sering kali menghambat upaya mobilisasi. Misalnya, pelaporan tentang pelanggaran HAM di Papua sering kali dibatasi oleh sensor pemerintah atau ancaman terhadap jurnalis, yang mengurangi dampak kampanye. Selain itu, polarisasi digital, seperti yang terjadi selama Pemilu 2019 di Indonesia, dapat memecah belah dukungan publik untuk isu HAM tertentu. Penelitian oleh Sulianta, F (2024) menunjukkan bahwa polarisasi digital sering kali diperburuk oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan konten yang memicu emosi, sehingga mengurangi efektivitas kampanye HAM. Untuk mengatasi tantangan ini, media perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih terkoordinasi dan berbasis data untuk memastikan pesan HAM sampai kepada audiens yang tepat tanpa memicu konflik sosial.

### 4. Tantangan Etis dan Struktural

Media dalam advokasi HAM menghadapi tantangan etis dan struktural yang kompleks. Secara etis, media harus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab untuk tidak memperburuk konflik sosial. Misalnya, pelaporan yang sensasional tentang isu agama atau etnis dapat memicu kekerasan, seperti yang terlihat dalam kerusuhan di Jakarta pada 2016 akibat hoaks tentang penistaan agama. Secara struktural, media independen sering kali beroperasi di bawah tekanan politik, ekonomi, dan hukum. Freedom House (2024) melaporkan bahwa di Indonesia, jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM sering menghadapi ancaman, mulai dari penahanan hingga kekerasan fisik. Kasus seperti penahanan jurnalis Philip Jacobson pada 2020 karena pelaporan tentang deforestasi di Kalimantan menunjukkan tantangan ini.

Selain itu, ketimpangan akses terhadap teknologi digital menjadi hambatan struktural lainnya. Kennedy *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa di Indonesia, kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan membatasi kemampuan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses atau berkontribusi pada kampanye HAM daring. Untuk mengatasi tantangan ini, Putri *et al.*, (2024) menyarankan bahwa peningkatan literasi digital dan akses teknologi adalah kunci untuk memastikan inklusivitas dalam advokasi HAM. Selain itu, perlindungan hukum bagi jurnalis dan media independen harus diperkuat untuk memastikan mereka dapat bekerja tanpa rasa takut.

### 5. Peran Teknologi Baru dalam Advokasi HAM

Menurut Atiyah *et al.*, (2025) perkembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI), analitik data, dan platform berbasis blockchain, telah membuka peluang baru untuk advokasi HAM. AI, misalnya, di Indonesia, platform seperti Change.org telah memanfaatkan teknologi untuk memobilisasi petisi daring tentang isu HAM, seperti perlindungan pekerja migran atau penolakan terhadap undang-undang yang dianggap membatasi kebebasan sipil.

Namun, teknologi baru juga membawa risiko. Algoritma media sosial sering kali memprioritaskan konten yang sensasional atau memecah belah untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, yang dapat memperburuk polarisasi atau menyebarkan informasi palsu Sarjito, A. (2024). Selain itu, penggunaan AI untuk pengawasan oleh pemerintah dapat mengancam kebebasan berekspresi, seperti yang terjadi di beberapa negara dengan sistem pengenalan wajah untuk memantau aktivis HAM. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi baru dalam advokasi HAM harus dilakukan dengan pendekatan yang etis dan berbasis prinsip HAM.

Untuk memberikan konteks yang lebih konkret, berikut adalah dua studi kasus yang menggambarkan peran media dalam advokasi HAM di Indonesia: 1. Kasus #KamiBersamaPapua: Kampanye ini dimulai pada 2019 sebagai respons terhadap kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Media sosial, khususnya Twitter, menjadi platform utama untuk menyebarkan informasi tentang insiden tersebut, dengan tagar #KamiBersamaPapua menjadi trending topic. Liputan oleh media daring seperti Tempo.co dan The Jakarta Post membantu menarik perhatian internasional, mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, kampanye ini juga menghadapi tantangan berupa hoaks dan narasi kontra yang mencoba mendiskreditkan aktivis Papua, menunjukkan kompleksitas penggunaan media sosial dalam advokasi HAM, 2. Kampanye #TolakUUNomnibusLaw: Pada 2020, undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) memicu protes luas karena dianggap merugikan hak buruh dan lingkungan. Media sosial dan situs berita independen memainkan peran kunci dalam memobilisasi demonstrasi dan menyebarkan informasi tentang dampak undang-undang tersebut. Namun, sensor pemerintah terhadap beberapa outlet media dan penyebaran informasi palsu tentang protes tersebut menunjukkan tantangan dalam menjaga narasi yang akurat dan inklusif (Freedom House, 2024).

## SIMPULAN

Media, baik tradisional maupun digital, memainkan peran krusial dalam advokasi HAM melalui amplifikasi suara kelompok termarjinalkan, pembentukan narasi inklusif, dan mobilisasi sosial untuk perubahan kebijakan. Di Indonesia, platform seperti media sosial dan situs berita daring telah berhasil menyoroti isu-isu seperti pelanggaran HAM di Papua, kesetaraan gender, dan hak pekerja migran, dengan kampanye seperti #KamiBersamaPapua dan #TolakUUNomnibusLaw sebagai contoh keberhasilan. Namun, tantangan seperti penyebaran hoaks, sensor, ancaman terhadap jurnalis, rendahnya literasi digital, dan kesenjangan akses teknologi menghambat efektivitas advokasi. Teknologi baru seperti AI dan analitik data menawarkan peluang besar, tetapi juga risiko polarisasi dan pelanggaran privasi. Untuk memaksimalkan potensi media, diperlukan perlindungan kebebasan pers, peningkatan literasi digital, dan pendekatan etis dalam pemanfaatan teknologi, guna memastikan advokasi HAM yang inklusif dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2021). *Silenced voices: The global attack on freedom of expression*. London, UK: Amnesty International.
- Atiyah, A., Fitriani, N. C., & Yamani, A. Z. (2025). Digitalisasi Legal Drafting Melalui Artificial Intelligence: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1283-1299.
- Apriando, T. (2018, 7 Februari). Lahan adat di Kaltim terus terancam, kala melawan berhadapan dengan aparat. Mongabay Indonesia. Diakses dari <https://mongabay.co.id/2018/02/07/lahan-adat-di-kaltim-terus-terancam-kala-melawan-berhadapan-dengan-aparat/>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2021). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2020). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dahlgren, P. (2022). *Media and civic cultures: Reimagining public spheres in the digital age*. New York, NY: Routledge.
- Freedom House. (2024). *Freedom on the Net: Indonesia Country Report*.
- Global Partnership for Education. (2023). *Digital literacy and human rights: A global perspective*. Washington, DC: Global Partnership for Education.
- Human Rights Watch. (2023). *World report 2023: Events of 2022*. New York, NY: Human Rights Watch.
- Kang, W., Hughes, M. A., & Roy, D. (2024). Anonymization of voices in spaces for civic dialogue: Measuring impact on empathy, trust, and feeling heard. arXiv.
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 134-147.
- Putri, N. M., Listiawati, W., & Rachman, I. F. (2024). Pengaruh literasi digital terhadap pemberdayaan masyarakat dalam konteks sdgs 2030. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 349-360.
- Papacharissi, Z. (2021). *After democracy: Imagining our political future*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175-186.
- Silverstone, R. (2020). *Media and morality: On the rise of the mediapolis*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Sulianta, OF. (2024). *Imagined Communities Dunia Siber*. Feri Sulianta.
- Suistyarini & Dewantara. (2023). Contoh kasus HAM: diskriminasi, penggusuran paksa, dan pelanggaran pekerja migran. Kompasiana.com. Dirujuk via ringkasan di Kompasiana
- Tapsell, R. (2019). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. London, UK: Rowman & Littlefield.
- UNESCO. (2022). *Journalism, fake news and disinformation: Handbook for journalism education and training*. Paris, France: UNESCO Publishing.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2020). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146-1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>